

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dimana negara yang memberikan keleluasaan dan kesempatan kepada Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah. Telah dijelaskan pada Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 18 menyatakan bahwa pembagian Daerah di Indonesia dibagi atas daerah besar dan daerah kecil.

Pengertian Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dengan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah Propinsi adalah daerah yang terbentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi, sedangkan untuk Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi saja disebut sebagai Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Daerah yang dibentuk dengan asas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat

Salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Penerapan asas desentralisasi ini merupakan wujud dari otonomi daerah yang juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan-perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Dengan itu diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, guna untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Soemitro (2014) “Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*publik uitgaven*)”.

Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Adapun pengertian Pajak Hiburan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Tarif tertinggi Pajak Hiburan adalah sebesar 35% sesuai yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 45 ayat 1.

Kota Batu dikenal sebagai salah satu kota wisata terkemuka di Indonesia karena potensi keindahan alam yang luar biasa, selain menyuguhkan keindahan alamnya Kota Batu juga mampu memanfaatkannya untuk membuat tempat – tempat wisata baru. Mengingat Kota Batu merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya. Sektor pariwisata Kota Batu berkontribusi cukup besar dari perolehan Pajak Hiburannya, tentunya ini menjadi salah satu faktor yang mampu mendorong peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu. Selain pariwisata yang ada di Kota Batu banyak jenis hiburan lain yang diberikan oleh pemerentih daerah untuk warga lokal atau warga Kota Batu sendiri.

Sektor pariwisata inilah yang diandalkan bagi penerimaan daerah maka Pemerintah Kota Batu dituntut untuk dapat menggali dan mengelola potensi wisata yang dimiliki sebagai usaha untuk mendapatkan sumber ekonomi melalui terobosan-terobosan baru dalam upaya membiayai pengeluaran daerah. Perkembangan sektor pariwisata di Kota Batu yang cukup pesat dapat dilihat dimana selalu ada pembangunan atau munculnya wahana atau tempat wisata alam/hiburan yang baru. Dan dari semua wisata yang dimiliki Kota Batu selalu menarik wisatawan domestik atau mancanegara.

Pelaksanaan pemungutan pajak hiburan haruslah jelas dan tidak menyimpang dan pemungutan harus dilakukan sesuai undang-undang yang berlaku. Salah satu contoh penyimpangan dalam pemungutan pajak hiburan adalah penggelapan pajak. (Duaji, 2009:14) Penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dimaksud adalah dimana tindak pidana melakukan rekayasa subyek (pelaku) dan obyek (transaksi) pajak guna untuk melakukan penghematan pajak agar memperoleh keuntungan tersendiri. Dimana hal ini merupakan tindakan yang melawan hukum (*unlawfully*), dan penggelapan pajak disebut sebagai virus yang melekat (*inherent*) pada setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap yurisdiksi. Penggelapan pajak berakibat pada menurunnya besar pajak yang akan diterima oleh suatu daerah.

Dengan adanya tempat wisata yang beragam diharapkan perolehan dari Pajak Hiburan dapat berkontribusi besar dalam penambahan nilai pendapatan

daerah. Dan dari kontribusi tersebut, pula diharapkan dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sehingga kota Batu nantinya bisa dikatakan sebagai kota yang maju. Dengan adanya kontribusi yang semakin besar dari sektor – sektor itulah maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu akan meningkat sehingga daerah mampu membiayai setiap kegiatan pembangunan yang ada di Kota Batu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hiburan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu?
2. Bagaimana pencapaian kinerja (efektivitas) Pajak Hiburan di Kota Batu?
3. Bagaimana kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batu?

C. Batasan Masalah

Adapaun batasan-batasan pembahasan dalam penelitian ini :

1. Upaya – upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hiburan di Kota Batu
2. Pencapaian kinerja (efektivitas) Pajak Hiburan Kota Batu
3. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah yang ada yaitu :

1. Untuk mengetahui upaya – upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hiburan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu
2. Untuk mengetahui pencapaian kinerja (efektivitas) Pajak Hiburan Kota Batu
3. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Badan Keuangan Daerah Kota Batu
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat memberikan evaluasi bagi Badan Keuangan Daerah dalam Peranan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu guna untuk menyempurnakan otonomi daerah itu sendiri.
2. Bagi Penulis Selanjutnya diharapkan tulisan ini dapat memberi manfaat untuk penulis selanjutnya guna untuk memberi referensi atau acuan dalam penulisan dengan topik yang sama, dan penulis dapat membandingkan atau menyempurnakan tulisan ini.